

Kekerasan Berbasis Gender: Mengatasi hambatan yang tidak terlihat untuk aksi iklim yang efektif



Ringkasan kebijakan ini disusun oleh Helpdesk Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Violence against Women and Children/VAWC), sebagai bagian dari program What Works to Prevent Violence against Women and Girls: Impact at Scale ('What Works II') di Inggris Raya. Dana dikelola oleh International Rescue Committee. Laporan ini disusun oleh Pemerintah Inggris Raya bersama dengan Pemerintah Australia. Pandangan yang disampaikan dan rekomendasi yang dibuat dalam publikasi ini sepenuhnya merupakan pandangan penulis dan bukan berarti mencerminkan pendapat atau maksud dari Pemerintah Inggris Raya atau Pemerintah Australia.

Ringkasan kebijakan ini disusun oleh Francesca Rhodes dari Care International UK, Naomi Clugston dari Social Development Direct, dan Erika Fraser dari Social Development Direct. Dokumen ini disusun berdasarkan laporan pendukung yang menjelaskan tentang kontribusi dari praktisi dan ahli yang bekerja di persimpangan antara perubahan iklim dan Kekerasan Berbasis Gender.

Laporan ini mencantumkan referensi dan deskripsi dari kekerasan berbasis gender. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal memerlukan bantuan, silakan hubungi layanan dukungan kekerasan berbasis gender setempat. Kunjungi lila.help untuk informasi tentang layanan dukungan yang tersedia di wilayah Anda.

Pendahuluan

Menangani kekerasan berbasis gender adalah komponen penting dari aksi iklim yang efektif. Menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif sehingga kebijakan dan program iklim bisa mendapatkan manfaat dari beragam keahlian dan perspektif dari perempuan, remaja putri, dan orang-orang dari beragam gender¹ sebagai pemimpin, pengambil keputusan, dan peserta. Hal ini mendukung komunitas agar lebih siap untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, membangun ketahanan, dan menjauhi praktik yang merusak lingkungan. Hal ini juga penting agar perempuan, remaja putri, dan orang-orang dari beragam identitas gender dapat terlibat dalam aktivitas iklim dan ekonomi hijau tanpa rasa takut atau intimidasi. Selama situasi darurat iklim,

Ringkasan ini dimaksudkan untuk membantu pembuat kebijakan dan praktisi dalam memahami bagaimana penanganan kekerasan berbasis gender

penanganan kekerasan berbasis gender juga merupakan bagian sangat penting dalam menjaga keamanan komunitas.

Meskipun demikian, kekerasan berbasis gender sering terabaikan dalam perancangan aksi iklim yang efektif dan, hingga saat ini, hanya sedikit program iklim yang memasukkan langkah-langkah untuk mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender. Namun, makin banyak bukti pada tingkat internasional yang menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender dapat dicegah, dengan beberapa intervensi yang berhasil memangkas jumlah kekerasan hingga separuhnya hanya dalam waktu beberapa tahun dengan cara menangani akar penyebabnya.²

Ringkasan ini dimaksudkan untuk membantu pembuat kebijakan dan praktisi dalam memahami bagaimana penanganan kekerasan berbasis gender dapat mendukung efektivitas program dan kebijakan perubahan iklim. Ringkasan ini menyajikan contoh-contoh praktik baik yang sedang berkembang dan menyediakan saran bagi semua pemangku kepentingan untuk menangani kekerasan berbasis gender secara lebih komprehensif. Ringkasan ini mengacu pada bukti dari seluruh penjuru dunia, yang mencerminkan luasnya skala tantangan yang dihadapi. Namun, mengingat kawasan Pasifik dan Asia Tenggara adalah salah satu wilayah dengan dampak iklim terbesar dan tingkat kekerasan berbasis gender yang tinggi, narasumber utama dari kawasan ini diprioritaskan. Ringkasan ini mengacu pada tinjauan pustaka berupa bukti dan praktik yang sudah ada mengenai kekerasan berbasis gender dan perubahan iklim, serta wawancara dengan pemangku kepentingan di bidang iklim dan kekerasan berbasis gender. Terdapat laporan pendamping yang menyediakan detail lebih lanjut tentang temuan penelitian dan studi kasus.

Contoh-contoh dalam ringkasan kebijakan ini mencerminkan besarnya kontribusi yang diberikan oleh organisasi yang dipimpin perempuan yang bekerja di garda depan dalam penanganan krisis iklim. Mereka melaporkan bahwa para pelaku melakukan kekerasan berbasis gender tanpa menerima konsekuensi hukum, bahwa hal ini memengaruhi kemampuan staf dan komunitas untuk terlibat dalam upaya iklim yang penting, dan bahwa hal ini harus dihentikan. Organisasi ini memiliki sumber daya yang terbatas, namun ada pelajaran berbasis praktik yang menjanjikan dari pekerjaan mereka, yang menunjukkan bahwa menangani kekerasan berbasis gender serta menciptakan komunitas yang lebih aman dan tangguh bukanlah hal yang mustahil dilakukan.

“Penelitian di tiga negara Asia Tenggara menemukan bahwa peningkatan 1 derajat suhu tahunan rata-rata berdampak pada 4,5% kenaikan pola kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat fisik dan seksual.”³Anik Gevers, Penasihat Teknis Spesialis, Konsultan Independen

“Pihak-pihak yang bergerak di bidang perubahan iklim harus berasumsi bahwa kekerasan berbasis gender benar-benar terjadi dan berupaya menjawab pertanyaan, apa yang akan kita lakukan untuk meminimalkan, menangani, dan mencegah kekerasan berbasis gender? Ini harus dipertimbangkan dalam cakupan program-program lingkungan.”

Jamie Wen-Besson, Manajer Senior Program Gender, International Union for Conservation of Nature (IUCN)

Istilah yang digunakan dalam ringkasan kebijakan ini

Ada beragam upaya untuk mencegah dan menangani dampak perubahan iklim. Ringkasan kebijakan ini menggunakan istilah **“aksi iklim”** untuk menyebut beberapa atau semua inisiatif berikut.

- **Inisiatif adaptasi dan ketahanan perubahan iklim:** program dan proyek yang mendukung komunitas garis depan dampak perubahan iklim untuk beradaptasi dan meningkatkan ketahanan dalam menghadapi dampaknya.
- **Kesiapan dan respons bencana akibat perubahan iklim:** program dan proyek yang mendukung komunitas yang rentan terhadap bencana yang dipicu oleh perubahan iklim untuk bersiap, merespons, dan membangun kembali pascabencana.
- **Aktivisme perubahan iklim dan lingkungan:** upaya yang dilakukan oleh para aktivis dan pejuang hak asasi manusia di bidang lingkungan untuk meningkatkan kesadaran tentang perubahan iklim dan menekan pihak-pihak berwenang untuk menghentikan perubahan iklim dan melindungi komunitas.
- **Transisi yang adil menuju ekonomi rendah karbon:** inisiatif yang berfokus pada pengalihan perekonomian dari ketergantungan terhadap bahan bakar fosil ke alternatif rendah karbon, serta pada kegiatan mitigasi dampak iklim.

Ringkasan kebijakan ini menggunakan istilah **kekerasan berbasis gender (GBV)** untuk merujuk pada kekerasan apa pun yang dilakukan terhadap wanita, remaja putri, atau orang-orang dari beragam gender dikarenakan jenis kelamin atau ekspresi gender mereka. Ringkasan kebijakan ini menggunakan istilah **eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual (SEAH)** untuk merujuk pada kekerasan yang dilakukan terhadap staf atau anggota komunitas oleh pelaku yang memiliki posisi kekuasaan yang bekerja di atau dengan organisasi pengembangan dan kemanusiaan, termasuk perusahaan swasta.

Penanganan kekerasan berbasis gender berkontribusi terhadap aksi iklim yang efektif melalui:

Pemberdayaan wanita untuk beradaptasi dan membangun ketahanan terhadap perubahan iklim, dan menghentikan praktik-praktik yang dapat merusak lingkungan

Upaya yang mendukung komunitas untuk beradaptasi dan membangun ketahanan secara efektif terhadap perubahan iklim memerlukan partisipasi semua anggota komunitas. Kekerasan berbasis gender dapat menghilangkan partisipasi wanita, remaja putri, dan orang-orang dari beragam gender dalam semua upaya tersebut. Penanganan kekerasan berbasis gender melalui aksi iklim dapat membantu memaksimalkan efektivitas upaya tersebut dengan cara menghilangkan salah satu hambatan yang dihadapi wanita, remaja putri, dan orang-orang dari beragam gender untuk terlibat dalam berbagai peluang membangun aset dan mengakses teknologi yang diperlukan untuk beradaptasi serta meningkatkan penghidupan dan ketangguhan komunitas. Misalnya, salah satu inisiatif di kawasan Pasifik berupaya merelokasi komunitas dari wilayah terdampak erosi pesisir, tetapi ketika para wanitanya mengalami peningkatan kekerasan berbasis gender di pemukiman baru, program ini kehilangan kepercayaan dan dukungan yang diperlukan untuk memperluas program ke komunitas lain.

Penanganan kekerasan berbasis gender juga mendukung komunitas untuk beralih dari praktik-praktik yang dapat merusak lingkungan. Misalnya, dari wawancara dengan para praktisi di Uganda yang bekerja untuk melindungi lahan basah dengan menghentikan pemanfaatan lahan ini sebagai lahan pertanian oleh masyarakat, terungkap bahwa penghidupan alternatif yang disediakan menempatkan para wanitanya dalam berbagai bentuk kekerasan berbasis gender. Hal ini menyebabkan banyak warga kembali bertani di lahan basah karena mereka merasa lebih aman di sini. Pada akhirnya, hal ini mengikis ketahanan komunitas, dan mengganggu upaya program dalam mengakhiri kerusakan lingkungan. Para praktisi setuju bahwa seandainya program mereka mengidentifikasi dan menangani risiko kekerasan berbasis gender dengan lebih baik, mereka akan memiliki posisi yang lebih kuat untuk mencapai target mereka, yakni mengurangi tingkat kerusakan lingkungan dan membangun ketahanan dan keamanan komunitas.

“Mengalami kekerasan berbasis gender atau selalu hidup di tengah ancaman kekerasan berbasis gender memaksa wanita dan keluarga mereka mengambil keputusan rumit serta mengelola berbagai risiko dan kebutuhan; mereka mungkin tidak selalu bisa memprioritaskan kelestarian lingkungan ketika keselamatan diri mereka terancam”

Anik Gevers, Penasihat Teknis Spesialis, Konsultan Independen

Mendukung pengambilan keputusan dan kepemimpinan wanita secara setara dalam adaptasi dan ketahanan

Kekerasan berbasis gender memunculkan hambatan besar bagi kepemimpinan dan pengambilan keputusan wanita dan orang-orang dari beragam gender dalam program-program iklim, karena mereka yang menghadapi atau sedang pulih dari kekerasan tidak dapat atau memilih untuk tidak terlibat dalam aktivitas, sementara sebagian dari mereka mungkin enggan terlibat dalam aktivitas yang akan meningkatkan risiko mereka menghadapi kekerasan. Wawancara dengan para praktisi iklim dan organisasi hak-hak perempuan di Kamboja dan Laos menjelaskan bahwa banyak wanita menghindari pertemuan publik yang dimaksudkan untuk mengembangkan pendekatan komunitas terhadap peristiwa iklim disebabkan adanya ancaman kekerasan dari suami dan anggota komunitas pria. Demikian juga, di Indonesia, narasumber menyampaikan bahwa para pemimpin wanita menjadi target ancaman pembunuhan dan kekerasan fatal, yang menghalangi mereka bekerja dengan komunitas untuk membangun ketahanan terhadap perubahan iklim. Kekerasan berbasis gender sering kali dilakukan oleh pasangan, anggota komunitas, atau pihak lain sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuatan pengambilan keputusan wanita.

Program berbasis komunitas dengan pengambilan keputusan yang setara bagi semua gender menghasilkan capaian iklim yang lebih baik, karena lebih mampu mencerminkan beragam kebutuhan dalam komunitas.⁴ Misalnya, survei yang melibatkan 440 pengguna hutan di Indonesia, Peru, dan Tanzania menemukan bahwa ketika setidaknya separuh pengambil keputusan adalah wanita, ada lebih banyak pohon yang dilestarikan.⁵ Oleh karena itu, penanganan risiko kekerasan berbasis gender yang dialami oleh pengambil keputusan dan pemimpin di bidang iklim merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan partisipasi yang setara bagi semua gender, serta meningkatkan efektivitas capaian iklim.

42% pejuang hak asasi manusia terkait lingkungan dari kalangan wanita yang disurvei di Kamboja dan Laos menyebut bahwa masalah keselamatan adalah hambatan terbesar yang menghalangi mereka berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam.⁶

Mencegah bahaya bagi individu dan komunitas selama kondisi darurat iklim

Bencana yang diakibatkan oleh iklim menempatkan wanita, remaja putri, dan orang-orang dari beragam gender pada risiko kekerasan berbasis gender yang terus meningkat, termasuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual (SEAH) yang dilakukan oleh pasangan, selain pasangan, anggota komunitas, pelaku perdagangan manusia, tim tanggap darurat, dan personel kemanusiaan, serta pihak-pihak lain.⁷ Kekerasan berbasis gender dan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dapat memberikan dampak yang berbahaya dan jangka panjang pada penyintas dan komunitas. Dalam kondisi darurat iklim, para penyintas kekerasan berbasis gender/eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual juga dapat menghadapi hambatan besar untuk terlibat dalam aktivitas kesiapsiagaan bencana disebabkan masalah keselamatan, cedera, stigma, serta risiko diskriminasi dan perlawanan. Hal ini dapat menghalangi mereka dari keikutsertaan dalam aktivitas seperti latihan praktik evakuasi dan menghambat informasi serta sumber daya yang mereka perlukan untuk bertahan hidup selama terjadi bencana. Mengintegrasikan mitigasi dan respons kekerasan berbasis gender dan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual ke dalam upaya kesiapsiagaan

dan respons kondisi darurat iklim akan menghasilkan aksi yang lebih aman dan efektif yang melibatkan lebih banyak wanita, remaja putri, dan orang-orang dari beragam gender, serta memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik. Para praktisi yang mendukung komunitas di kawasan Pasifik yang terdampak bencana angin topan menjelaskan bahwa kegagalan menangani risiko kekerasan berbasis gender terhadap komunitas LGBTQIA+, terutama para transgender, di pusat-pusat evakuasi menyebabkan banyak dari mereka kembali ke tempat penampungan darurat yang tidak aman di lokasi-lokasi terdampak angin topan. Menangani peningkatan risiko kekerasan berbasis gender dan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual yang dialami oleh wanita, remaja putri, dan orang-orang dari beragam gender selama kondisi darurat iklim akan menghasilkan aksi tanggap darurat yang lebih aman dan efektif.

Memberdayakan **para aktivis iklim** untuk bekerja tanpa rasa takut atau intimidasi

Penanganan kekerasan berbasis gender sangat penting untuk mendukung aktivis iklim dan Pejuang Hak Asasi Manusia terkait Lingkungan (EHRD) dalam menjalankan pekerjaan mereka karena kekerasan ini selalu digunakan sebagai taktik untuk membungkam aktivis. Seorang wanita yang merupakan kepala Masyarakat Adat San sekaligus EHRD dari Namibia melaporkan bahwa ia takut berjalan sendirian dikarenakan pelecehan yang ia terima, dan bahwa ia lebih berisiko mengalami kekerasan dari pihak berwenang karena statusnya sebagai anggota masyarakat adat.⁸ Pelecehan terhadap aktivis wanita dan remaja putri yang terjadi secara online juga terbukti meningkatkan praktik penyensoran diri, sehingga membatasi keikutsertaan mereka dalam aktivisme dan kehidupan publik.⁹ Keluarga dan anggota komunitas juga dapat merasakan dampak dan risikonya karena hubungan mereka dengan seorang aktivis. Sebagai contoh, seorang pejuang pelestarian lingkungan Masyarakat Adat di Honduras meminta anak-anaknya pergi setelah ia menerima ancaman kekerasan pembalasan sebelum ia pada akhirnya terbunuh pada tahun 2016.¹⁰ Menyediakan dukungan bagi aktivis iklim dan EHRD untuk mengantisipasi dan menangani ancaman kekerasan berbasis gender dapat membantu memastikan mereka dapat melanjutkan pekerjaan mereka dengan aman.

Survei global yang melibatkan lebih dari 1000 aktivis putri, termasuk aktivis iklim dan lingkungan, menemukan bahwa hanya 50% dari mereka yang merasa nyaman menyuarakan aktivisme mereka di dalam komunitas mereka karena takut mengalami kekerasan, pelecehan, atau pengucilan.¹¹

Mendukung **‘transisi yang adil’**

Penanganan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (SEAH) dan kekerasan berbasis gender membantu memastikan transisi ke perekonomian rendah karbon tidak menimbulkan bahaya, membangun kepercayaan masyarakat terhadap transisi, dan memungkinkan upaya memperoleh manfaat dari keahlian dan keterampilan wanita, remaja putri, dan orang-orang dari beragam gender. Kekerasan berbasis gender dan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual memberikan dampak jangka panjang dan sangat berbahaya pada penyintas dan komunitas. Terdapat bukti baru yang menunjukkan adanya risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual di beberapa industri

energi bersih, yang sering kali didominasi oleh pria atau memerlukan konstruksi skala besar. Penambangan sumber daya alam yang digunakan dalam produksi energi terbarukan, seperti litium, kobalt, mangan, platina, aluminium, dan tembaga dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan berbasis gender.¹² Selama transisi ke perekonomian rendah karbon, dinamika kekuasaan yang mendorong terjadi kekerasan ini harus ditangani guna memastikan upaya-upaya ini 'tidak menimbulkan bahaya'. Jika tidak, kekerasan berbasis gender dan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual berisiko merusak kepercayaan dan keterlibatan komunitas dalam industri energi bersih ini, dan pada akhirnya mengganggu implementasi dan keberlangsungan capaian iklim.

Transisi ke perekonomian hijau juga cenderung menyebabkan hilangnya pekerjaan di dalam sektor-sektor yang memiliki dampak buruk terhadap lingkungan, yang kebanyakan didominasi oleh pria. Bukti global menunjukkan bahwa pengangguran dan tekanan finansial meningkatkan risiko terjadi kekerasan yang dilakukan oleh pria yang tidak mampu menemukan atau mempertahankan pekerjaan.¹³ Di komunitas penambangan batu bara di 'Old Copperbelt' Zambia, penelitian yang dilakukan oleh AS, Polandia, dan Inggris menemukan bahwa penutupan tambang dan pengangguran menyebabkan munculnya tekanan finansial, ketegangan rumah tangga, dan meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh pasangan.¹⁴ Pertimbangan dan mitigasi yang cermat terhadap dinamika ini serta bagaimana dampaknya terhadap peningkatan risiko kekerasan berbasis gender menjadi langkah penting untuk mencapai 'transisi yang adil' yang mendukung hak asasi manusia. Jika transisi ke perekonomian rendah karbon dikaitkan dengan peningkatan kekerasan berbasis gender dan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual di dalam komunitas, hal ini dapat mengikis dukungan dan keterlibatan komunitas dalam inisiatif 'transisi yang adil'.

'Transisi yang adil' juga menciptakan peluang baru dalam perekonomian hijau, yang akan memperoleh manfaat dari keahlian penting yang dimiliki wanita dan orang-orang dari beragam gender yang bekerja di berbagai sektor. Namun, risiko kekerasan berbasis gender dan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual di dalam industri-industri ini menghadirkan hambatan besar terhadap keterlibatan mereka. Wanita yang bekerja di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) mengalami tingkat pelecehan seksual yang tinggi, dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa 43% lulusan STEM perempuan, 50% wanita di bidang sains, dan 58% wanita di bidang akademik dilaporkan pernah mengalami pelecehan seksual.¹⁵ Survei tahun 2022 menemukan bahwa 58% ilmuwan iklim perempuan yang pernah menjadi korban pelecehan dan kekerasan secara online mengalami penurunan produktivitas di tempat kerja, dengan 25% di antara mereka merasa takut atau cemas menghadapi pekerjaan.¹⁶ Penanganan kekerasan berbasis gender dan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual di dalam industri hijau sangat penting agar wanita dan orang-orang dari beragam gender yang terampil dapat berkontribusi pada pekerjaan ini.

Karena kekerasan dan pelecehan online, 41% ilmuwan iklim perempuan mengatakan bahwa mereka lebih jarang memposting di media sosial, 33% lebih jarang berkontribusi di media, dan 27% lebih jarang berbicara di depan publik tentang masalah iklim.¹⁷

Jenis-jenis dan faktor pendorong kekerasan berbasis gender untuk ditangani melalui aksi iklim

Memahami jenis-jenis kekerasan berbasis gender yang dikaitkan dengan perubahan iklim dan aksi iklim adalah langkah awal yang sangat penting bagi para praktisi dan pembuat kebijakan yang berkomitmen meningkatkan dampak positif dan efektivitas mereka.¹⁸ Diperlukan analisis khusus konteks untuk memahami bagaimana intervensi iklim tertentu dapat menangani risiko dan dampak kekerasan berbasis gender dengan cara yang paling efektif.

Jenis-jenis kekerasan berbasis gender yang dikaitkan dengan perubahan iklim dan aksi iklim yang diidentifikasi melalui penelitian ini mencakup tetapi tidak terbatas pada:

Kekerasan oleh pasangan (IPV): Perubahan iklim dapat memperparah dorongan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pasangan, misalnya, dengan meningkatkan kemiskinan dan kerentanan. Pria juga terkadang melakukan kekerasan jenis ini sebagai bentuk perlawanan ketika wanita berpartisipasi dalam program iklim. Di Uganda, program kesejahteraan menyediakan sapi bagi para wanita sebagai sumber penghidupan alternatif selain bertani di lahan basah. Namun, norma budaya yang memandang sapi sebagai milik pria untuk membayar mas kawin membuat banyak suami mencuri sapi tersebut dan menggunakannya untuk menikah lagi, sehingga para wanita berada dalam risiko dan tujuan program menjadi tidak tercapai.

Kekerasan seksual bukan oleh pasangan: Kekerasan seksual bukan oleh pasangan sering meningkat setelah bencana yang diakibatkan perubahan iklim. Setelah banjir tahun 2018 di Laos, 27% warga pernah mendengar kabar seseorang mengalami pemerkosaan.¹⁹ Dampak jangka panjang dan sering kali parah dari kekerasan ini bisa sangat menghambat kemampuan penyintas serta keluarga mereka untuk pulih dari bencana.

Eksplotasi, kekerasan, dan pelecehan seksual (SEAH): Ketika Topan Freddy menerjang Malawi pada tahun 2023, para wanita di kamp Pengungsi Internal (IDP) melaporkan bahwa mereka mengalami pelecehan seksual oleh pekerja bantuan kemanusiaan dan diminta melakukan tindakan seksual sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan.²⁰ Selain itu, terdapat risiko-risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual yang dikaitkan dengan proyek besar infrastruktur hijau dan energi terbarukan, termasuk lokasi terpencil, personel keamanan, pekerja lepas laki-laki, dan pekerja laki-laki dengan kontrak sementara.²¹ Misalnya, pada tahun 2015, Proyek Pengembangan Sektor Transportasi Uganda (TSDP) yang didanai oleh Bank Dunia kehilangan pendanaan setelah adanya kampanye oleh komunitas Bigodi di Uganda (diperkuat oleh liputan media internasional) yang menuntut Bank Dunia untuk menangani kasus-kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual terhadap remaja putri oleh para pekerja konstruksi.²²

Pernikahan anak: Di Afrika Timur,²³ Malawi,²⁴ dan Bangladesh,²⁵ jumlah pernikahan anak meningkat setelah banjir menghancurkan hasil panen dan memperparah kondisi perekonomian. Di Ethiopia, pernikahan anak meningkat sebesar 119% pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 di area-area yang paling terdampak oleh kekeringan dan kekurangan pangan, yang dapat diperparah oleh perubahan iklim.²⁶ Di Bangladesh, 45% responden mengaitkan pernikahan dini dengan bencana akibat perubahan iklim, sementara setelah bencana, remaja putri menerima risiko tingkat

kekerasan yang lebih tinggi karena mas kawin yang belum dibayarkan oleh pihak perempuan. Pernikahan anak memiliki konsekuensi yang serius, termasuk meningkatnya kekerasan oleh pasangan, kekerasan seksual, pembatasan peluang edukasi dan ekonomi, pengucilan, dan hilangnya hak kontrol atas diri sendiri. Pernikahan anak mendorong kemiskinan dan kerentanan hidup, sehingga membatasi keselamatan dan kemampuan remaja putri serta keluarganya untuk beradaptasi dengan perubahan iklim.

Pelecehan, disinformasi, dan ancaman kekerasan online: Survei yang melibatkan 485 wanita pejuang hak asasi manusia di 67 negara menemukan bahwa 1 dari 3 responden pernah menghadapi tuduhan palsu dan disinformasi, yang mengancam reputasi serta kemampuan mereka dalam menjalankan pekerjaan mereka.²⁷ Penelitian PBB menemukan bahwa aktivis dari kalangan wanita muda dan remaja putri, termasuk yang terlibat dalam aktivisme lingkungan, sangat berisiko mengalami pelecehan online, pemerasan, dan serangan deepfake.²⁸

Perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual dan kerja paksa: Perubahan iklim melipatkandandakan faktor yang dapat mendorong terjadinya perdagangan manusia, termasuk hilangnya penghidupan dan kemiskinan.²⁹ Selain itu, makin banyak bukti menunjukkan bahwa perubahan iklim berperan sebagai pengganda ancaman bagi praktik pekerja anak, terutama di sektor pertanian. Perdagangan manusia dan kerja paksa menjadi tantangan tambahan bagi komunitas yang berusaha tetap tangguh dalam menghadapi perubahan iklim.



Kekerasan berbasis gender sebagai bentuk kerugian dan kerusakan

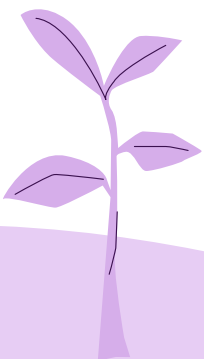
Kerugian dan kerusakan adalah 'efek negatif perubahan iklim yang terjadi meskipun sudah ada upaya mitigasi dan adaptasi.'³⁰ Ada dua bentuk utama kerugian dan kerusakan yang umumnya dipahami:

- Ekonomi - 'dampak negatif di mana biaya dapat dihitung, seperti kerusakan infrastruktur atau berkurangnya hasil panen.'³¹
- Non-ekonomi - 'dampak negatif yang tidak mudah diperdagangkan di pasar dan biasanya sulit diukur dengan nilai uang, seperti hilangnya budaya, perpindahan paksa, dan cara hidup. Dampak ini cenderung lebih sulit diperbaiki dan dipulihkan.'³²

Dampak perubahan iklim dalam mendorong level kekerasan berbasis gender yang lebih tinggi telah disoroti oleh para pembela hak-hak wanita sebagai bentuk kerugian dan kerusakan non-ekonomi.³³ Sebuah studi tentang bagaimana wanita dan remaja putri mengalami kerugian dan kerusakan di Bangladesh, Fiji, dan Vanuatu menemukan bahwa kesehatan mental wanita dan anak-anak terdampak secara negatif, mobilitas mereka terbatas, dan pengalaman mereka terhadap kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi, serta perdagangan manusia meningkat akibat dampak perubahan iklim.³⁴

Pada COP28 tahun 2023, Fund for Responding to Loss and Damage mulai dioperasikan untuk menyediakan pendanaan bagi negara-negara berkembang (sebagaimana didefinisikan oleh UNFCCC) yang sangat rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim.³⁵ Seiring dengan meningkatnya peran dan skala bentuk pendanaan ini, donatur dan pemerintah perlu melibatkan pengumpulan data mengenai kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI), termasuk kekerasan berbasis gender, ketika mempertimbangkan hal-hal yang dianggap sebagai kerugian dan kerusakan.

Perubahan iklim sebagai faktor pendorong kekerasan berbasis gender merupakan bentuk utama kerugian dan kerusakan non-ekonomi yang hingga saat ini belum tercakup dalam negosiasi kerugian dan kerusakan.



Pendekatan yang efektif dalam menangani kekerasan berbasis gender dalam aksi iklim

Penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan yang signifikan dalam program aksi iklim jangka panjang yang dievaluasi secara ketat, yang dirancang untuk menangani Kekerasan Berbasis Gender sebagai bagian dari cakupannya. Ini merupakan bidang penting untuk dieksplorasi dan diinvestasikan lebih lanjut, yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan aksi iklim yang lebih inklusif dan dengan landasan bukti yang lebih kuat.

Diagram ini menyoroti alasan pentingnya penanganan kekerasan berbasis gender dalam aksi iklim dan menguraikan beberapa strategi penting yang mungkin efektif untuk mencapai hal tersebut.

Empat area utama aksi iklim yang tercakup adalah:

1. Adaptasi dan ketahanan
2. Respons terhadap bencana akibat perubahan iklim
3. Transisi ke perekonomian rendah karbon
4. Aktivisme iklim dan lingkungan



Melalui wawancara dengan informan kunci dan tinjauan pustaka, kami menemukan contoh-contoh praktik baru yang menjanjikan untuk mencegah dan merespons kekerasan berbasis gender dalam aksi iklim:

Mengintegrasikan pencegahan dan respons kekerasan berbasis gender ke dalam kebijakan dan pendanaan perubahan iklim. Kebijakan internasional dan nasional dapat digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana perubahan iklim dapat memicu kekerasan berbasis gender, dan bagaimana kekerasan berbasis gender dapat menghalangi upaya mitigasi perubahan iklim, serta menetapkan rekomendasi dan tujuan untuk membantu memastikan keselarasan kebijakan dan mengalokasikan sumber daya guna mencegah dan merespons kekerasan berbasis gender. Misalnya, Republik Kepulauan Marshall (RMI) memprioritaskan pencegahan kekerasan berbasis gender sebagai bagian komitmen nasional (NDC) mereka terhadap Perjanjian Paris.³⁶ Rencana Adaptasi Nasional (NAP) Suriname menyerukan pelatihan tentang kekerasan berbasis gender bagi relawan yang merespons bencana, sementara NAP Kiribati dimaksudkan untuk memperkuat basis bukti mengenai keterkaitan antara kekerasan berbasis gender dan perubahan iklim.³⁷ Kekerasan berbasis gender juga dapat diintegrasikan ke dalam pendanaan iklim, baik untuk adaptasi, mitigasi, maupun kerugian dan kerusakan, tetapi perkiraan saat ini menunjukkan bahwa porsi masih sangat kecil dibandingkan total pendanaan iklim sejauh ini.

Perkiraan saat ini menunjukkan bahwa penanganan kekerasan berbasis gender masih sangat kecil dibandingkan total pendanaan iklim. Sebagai contoh, sebuah analisis terhadap pendanaan iklim sebesar 12,7 miliar USD yang dialokasikan untuk Rwanda antara 2013 dan 2022 menunjukkan bahwa hanya 0,01% intervensi yang memasukkan kode tujuan kekerasan berbasis gender.³⁸

Mengintegrasikan analisis kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam perancangan dan evaluasi program dan proyek. Intervensi adaptasi iklim, mitigasi, kesiapsiagaan dan respons bencana, serta kerugian dan kerusakan menjadi lebih aman dan efektif jika didasarkan pada pemahaman yang spesifik konteks mengenai risiko dan dampak kekerasan berbasis gender, sehingga memastikan bahwa intervensi dirancang sedemikian rupa untuk mengantisipasi dan merespons tantangan-tantangan tersebut. Sebagai contoh, Manajemen Risiko Bencana (DRM) Kamboja, Oxfam, bekerja dengan komunitas yang berisiko mengalami banjir mengintegrasikan perencanaan dan respons kekerasan berbasis gender ke dalam latihan simulasi DRM.³⁹ Di Nepal, program Hariyo Ban difokuskan untuk mendukung kepemimpinan wanita dalam manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan. Program ini mengidentifikasi kekerasan berbasis gender sebagai hambatan yang signifikan bagi partisipasi perempuan dan berusaha mengatasi hal ini dengan melibatkan pria dan remaja putra sebagai duta kesetaraan dan inklusi sosial.⁴⁰ Penanganan kekerasan berbasis gender juga perlu diintegrasikan ke dalam kerangka kerja pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran untuk mendukung akuntabilitas dan praktik terbaik. Mengintegrasikan respons terhadap kekerasan berbasis gender ke dalam intervensi iklim dapat mengurangi risiko dampak kekerasan berbasis gender yang dapat mengganggu tujuan aktivitas.

Menangani kekerasan berbasis gender untuk meningkatkan partisipasi wanita dalam perlindungan Hutan Mangrove Indonesia.

Di Indonesia, wanita di komunitas yang terdampak kerusakan lingkungan mengalami kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan oleh pasangan, perdagangan manusia, dan kekerasan dari organisasi multinasional termasuk ancaman pembunuhan. Yayasan Srikandi Lestari bekerja untuk mengadvokasi pencegahan kerusakan lingkungan, dan mendukung penghidupan serta partisipasi wanita dalam upaya konservasi.

DAMPAK KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEKERJAAN MEREKA:

Di dalam komunitas, kekerasan berbasis gender menghalangi banyak wanita untuk berpartisipasi dalam aktivitas program, dengan menghambat kemampuan mereka untuk membangun ketahanan terhadap kerusakan lingkungan dan berkontribusi dalam aktivitas pemulihan, sehingga program-program tersebut menjadi kurang efektif. Selain itu, kekerasan berbasis gender terhadap staf dan aktivis menghambat kemampuan organisasi untuk beroperasi secara efektif.

CARA PROGRAM INI MENANGANI KEKERASAN BERBASIS GENDER:

- **Pelatihan Legal dan Hak:** Yayasan ini mengedukasi wanita, pria, dan nelayan tentang hak-hak legal mereka ketika menghadapi kerusakan lingkungan, kekerasan, dan kekerasan berbasis gender. Mereka menyediakan bantuan hukum bagi wanita yang mengalami kekerasan berbasis gender, sehingga memastikan kasus mereka ditangani dengan semestinya.
- **Lokakarya:** Yayasan ini mengadakan lokakarya yang mempertemukan wanita dan pengacara untuk mendiskusikan hak-hak terkait kekerasan berbasis gender, perubahan iklim, dan dampak kesehatan. Pelatihan ini membantu membangun kesadaran dan membekali peserta dengan pengetahuan tentang cara merespons masalah-masalah ini, memupuk dan memperkuat ketahanan, dan kepemimpinan di komunitas mereka.
- **Pertolongan Pertama pada Kesehatan Mental:** Yayasan ini menawarkan pertolongan pertama pada kesehatan mental bagi penyintas kekerasan berbasis gender serta solidaritas melalui koneksi dengan sesama penyintas yang memiliki pengalaman serupa.
- **Penampungan:** Sebelumnya, Yayasan ini menawarkan penampungan bagi wanita yang pernah bekerja dengan mereka dan juga pernah mengalami kekerasan berbasis gender dan memerlukan tempat tinggal yang aman.
- **Keterlibatan dengan organisasi hak asasi manusia internasional:** Yayasan ini menjalin komunikasi dengan organisasi hak asasi manusia internasional yang memantau risiko kekerasan berbasis gender yang sedang mereka hadapi, agar mereka dapat mengambil tindakan apabila ada staf Yayasan yang mengalami bahaya.

TANTANGAN:

- Masalah keselamatan: Yayasan menghadapi ancaman serius terhadap keselamatan staf, dan memerlukan peningkatan dukungan dari organisasi dan lembaga dalam negeri lainnya untuk menangani ancaman tersebut.
- Penolakan dari komunitas: Terkadang, para suami melarang istri-istri mereka berpartisipasi dalam aktivitas Yayasan. Dalam hal ini, Yayasan berkomunikasi langsung dengan para pria, terutama melalui kelompok pria/komunitas untuk menjelaskan tujuan program dan manfaatnya bagi seluruh komunitas.

Sumber: Cuplikan wawancara dengan Dewi dan Mimi dari Yayasan Srikandi Lestari, Indonesia

Bekerja dengan pakar kekerasan berbasis gender lokal dan Komunitas Adat, kelompok penyintas, dan organisasi hak-hak wanita.⁴¹ Kelompok lokal dapat membantu memastikan kebijakan dan program dirancang dan dijalankan sesuai konteks, dan mendapatkan dukungan serta tanggung jawab dalam komunitas baik terhadap target penanganan kekerasan berbasis gender maupun iklim. Sebagai contoh, di Somalia, Aksi untuk Masalah Wanita dan Anak-Anak (Action for Women and Children Concern/AWCC), bekerja sama dengan kelompok wanita untuk mengintegrasikan pencegahan kekerasan berbasis gender ke dalam rencana ketahanan iklim komunitas.⁴² Wanita didukung untuk terlibat dalam perancangan dan perencanaan melalui kepanitiaan dan diskusi, serta dalam penerapan dan evaluasi aktivitas. Program ini memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan wanita, dan menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko kekerasan berbasis gender yang terjadi berkaitan dengan partisipasi mereka.

Mempertimbangkan kebutuhan spesifik kelompok yang mengalami berbagai bentuk marginalisasi. Kelompok yang dimarginalkan menghadapi risiko kekerasan berbasis gender tambahan dan lebih kompleks serta memerlukan intervensi yang sesuai konteks untuk memastikan respons yang efektif terhadap kekerasan berbasis gender. Ini mencakup penyandang disabilitas, orang-orang dari beragam gender dan LGBTQIA+, kelompok masyarakat adat, kelompok minoritas etnis, orang dari latar belakang migran dan pengungsi, wanita lanjut usia, dan remaja putri. Wawancara dengan para praktisi dari Young Women Initiative (YouWin) di Filipina menunjukkan bahwa GBV Watch Groups mereka, yang dimaksudkan untuk memperkuat mekanisme respons kekerasan berbasis gender, melatih kelompok wanita dan remaja putri, termasuk anggota komunitas LGBTQIA+, penyandang disabilitas, serta orang-orang yang berasal dari masyarakat adat maupun non-masyarakat adat, untuk memastikan upaya mereka benar-benar sesuai dengan kebutuhan kelompok yang beragam di dalam komunitas. Di Vietnam, Pusat Pengembangan Wilayah Pedesaan (Centre for Rural Development) membentuk kelompok khusus bagi anak-anak penyandang disabilitas agar mereka dan para pengasuhnya bisa mendapatkan informasi tentang dampak perubahan iklim. Kelompok ini diperlukan karena anak-anak penyandang disabilitas sering tidak diikutsertakan dalam kelompok umum akibat tabu sosial dan pelarangan dari ayah atau suami.⁴³

Menantang norma-norma sosial berbahaya yang menormalisasi kekerasan. Di Kamboja, Pusat Pelatihan Kehutanan Komunitas Wilayah (Regional Community Forestry Training Centre/RECOFTC) dan Gender dan Pengembangan untuk Kamboja (Gender and Development for Cambodia/GADC) mendukung partisipasi wanita dalam kawasan lindung berbasis komunitas dan pengelolaan hutan dengan mengatasi norma-norma sosial berbahaya yang mendorong pria melakukan kekerasan.

Proyek ini melibatkan pria dan remaja putra untuk menantang sikap-sikap merugikan terkait partisipasi wanita dalam perlindungan lingkungan dan mengubah norma-norma sosial serta perilaku yang merugikan dari suami dan pemimpin laki-laki. Di Kenya, Asosiasi Konservasi Alam Liar Kenya (Kenya Wildlife Conservancies Association/KWCA) dan Asosiasi Konservasi Alam Liar Taita Taveta (Taita Taveta Wildlife Conservancies Association/TTWCA) bekerja sama untuk mendukung wanita berpartisipasi secara aman dan bermakna dalam inisiatif konservasi dan lingkungan. Program mereka menantang norma-norma sosial yang merugikan dan meningkatkan kemampuan mitra untuk menangani kekerasan berbasis gender dalam program dan upaya konservasi mereka.⁴⁴ Hal ini mencakup upaya untuk mencegah kekerasan oleh pasangan, serta kekerasan fisik dan psikologis selain dari pasangan, yang makin sering dialami oleh wanita penjaga hutan yang bekerja untuk mengelola dan melindungi kawasan konservasi. Hal ini juga mencakup upaya untuk mendukung sekutu laki-laki (para pria di dalam komunitas yang berkomitmen untuk mendukung kesetaraan gender), yang sering kali menghadapi pelecehan verbal karena mendukung partisipasi wanita di ruang-ruang tersebut. Mengurangi hambatan bagi partisipasi wanita dalam aksi iklim dapat mendukung capaian iklim yang lebih baik melalui peningkatan keterlibatan dan pengambilan keputusan mereka di dalam intervensi.

Memastikan layanan kekerasan berbasis gender disediakan bersamaan dengan upaya tanggap bencana. Wawancara dengan praktisi iklim dan kekerasan berbasis gender menyoroti pentingnya memusatkan upaya tanggap bencana dan kekerasan berbasis gender. Para praktisi kekerasan berbasis gender berada pada posisi yang tepat untuk mengidentifikasi dan membantu menghubungkan para pekerja iklim dengan layanan yang ada (termasuk layanan kesehatan, dukungan psikososial, penegakan hukum, dan peradilan), serta mendukung para pekerja iklim dalam mengembangkan layanan yang efektif dan berpusat pada penyintas untuk mengatasi kesenjangan yang ada. Sebagai contoh, International Planned Parenthood Federation (IPPF) bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi penanganan bencana di Fiji untuk mengadakan latihan simulasi Kesehatan Seksual dan Reproduksi (SRH) dalam situasi darurat, yang juga mencakup respons terhadap kekerasan berbasis gender.⁴⁵ Demikian juga, praktisi perubahan iklim dapat mendukung praktisi kekerasan berbasis gender dalam mengintegrasikan risiko dan peluang perubahan iklim ke dalam pekerjaan mereka. Praktisi kekerasan berbasis gender harus memastikan upaya respons terhadap kekerasan berbasis gender dalam konteks bencana akibat iklim selaras dengan [16 Standar Minimum Antarlembaga untuk Program Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Darurat](#).

Menangani kekerasan berbasis gender melalui upaya penurunan risiko bencana di Filipina

Filipina adalah negara yang rentan terkena bencana yang mengalami rata-rata 20 badai topan per tahun, dengan dampak yang makin merusak akibat perubahan iklim.⁴⁶

DAMPAK KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEKERJAAN MEREKA:

Sebagian besar program pengelolaan risiko bencana (DRM) di wilayah ini berfokus pada pembersihan dan pelatihan keterampilan, tetapi sering mengabaikan kekerasan berbasis

gender, yang membatasi partisipasi dan keamanan wanita dan remaja putri dalam upaya tanggap darurat. Ketika wanita dan remaja putri tidak dapat berpartisipasi dalam program pengelolaan risiko bencana, hal ini mengurangi kesempatan mereka untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melindungi diri sendiri dan keluarga selama bencana.

CARA PROGRAM INI MENANGANI KEKERASAN BERBASIS GENDER:

Pada tahun 2020, organisasi yang dipimpin oleh komunitas adat “Young Women Initiatives (YouWIn)” memulai Kampanye Kelompok Pengawas Kekerasan Berbasis Gender untuk mengatasi kesenjangan ini. Setiap kelompok terdiri dari 15-20 wanita dari berbagai usia, dari komunitas LGBTQIA+, wanita penyandang disabilitas, dan wanita dari komunitas adat sekaligus non-komunitas adat. Kelompok Pengawas Kekerasan Berbasis Gender ini mengidentifikasi wanita-wanita yang berisiko, membantu mendokumentasikan kekerasan, mengarahkan korban ke layanan dukungan, memberikan pertolongan pertama psikologis, dan membantu korban dalam melaporkan kekerasan. Mereka juga mengadvokasi hak-hak wanita, berkolaborasi dengan layanan lokal yang kekurangan sumber daya, dan aktif dalam pusat-pusat evakuasi dengan risiko kekerasan berbasis gender dan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual yang tinggi. Organisasi ini telah menghadapi perlawanan dari beberapa pria yang melarang istri mereka berpartisipasi dalam kelompok. Untuk mengatasinya, mereka bekerja sama dengan komunitas untuk menantang norma-norma yang berbahaya.

PEMBELAJARAN UTAMA:

Cerita-cerita tentang perubahan menunjukkan bahwa wanita merasa memiliki kontrol yang lebih besar atas diri mereka melalui partisipasinya dalam Kelompok Pengawas Kekerasan Berbasis Gender, sementara pria menjadi lebih siap untuk memperjuangkan hak-hak wanita. Selain itu, organisasi yang terlibat dalam pengelolaan risiko bencana kini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan wanita dan remaja putri dalam situasi krisis, serta lebih siap untuk mendukung penyintas kekerasan berbasis gender, memastikan mereka aman dan memiliki akses ke layanan penting selama bencana akibat perubahan iklim.

Sumber: Wawancara dengan Jade P. Leung, Koordinator Utama di “Young Women Initiatives (YouWIn)”

Pelatihan dan pembangunan kapasitas dalam mencegah dan merespons kekerasan berbasis gender. Dalam program iklim, baik untuk adaptasi, ketahanan, maupun tanggap bencana, penting untuk mengembangkan pemahaman bersama tentang apa saja yang termasuk kekerasan berbasis gender di komunitas dan di antara staf, serta bagaimana setiap kejadian harus ditangani, termasuk menyusun jalur rujukan ketika hal tersebut terjadi. World Wildlife Fund for Nature (WWF) di Laos telah menerapkan kebijakan di mana setiap kegiatan lapangan, pengumpulan data, atau kerja sama dengan otoritas lokal selalu disertai pelatihan gender, termasuk sesi tentang pencegahan dan respons kekerasan berbasis gender, serta akses ke keadilan.⁴⁷ Dalam ekonomi hijau, dan 'transisi

yang adil', penanganan sikap-sikap yang merugikan, pelecehan, dan kekerasan dengan mendukung budaya organisasi yang positif dapat membantu menantang stereotip gender. Hal ini membantu membangun sumber daya manusia yang beragam dan mempertahankan pekerja wanita di sektor-sektor yang menangani perubahan iklim.

Mendukung aktivis iklim dan lingkungan untuk menjalankan pekerjaan mereka tanpa rasa takut.

Memberikan pendanaan untuk mendukung ketahanan, keamanan, dan pendampingan oleh pengamat hak asasi manusia internasional dapat membantu mengurangi risiko dan dampak kekerasan berbasis gender bagi para aktivis. Peace Brigades International (PBI) menugaskan pengamat hak asasi manusia untuk mendampingi Pejuang Hak Asasi Lingkungan (Environmental Human Rights Defenders/EHRD) guna mengurangi risiko serangan terhadap mereka. Mereka juga menyoroti pekerjaan para aktivis wanita dalam laporan-laporannya,⁴⁸ menyelenggarakan kunjungan dari jurnalis internasional,⁴⁹ mengajukan investigasi ancaman dari pemerintah, dan mendukung EHRD wanita untuk berbicara di konferensi internasional seperti Conference of the Parties (COP) yang diselenggarakan UNFCCC. Langkah-langkah ini dirancang untuk membantu memberikan rasa aman bagi aktivis wanita dan, dengan demikian, mereka lebih mampu menjalankan aktivitasnya tanpa rasa takut.

Membangun mekanisme pengamanan yang kokoh. Peristiwa eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dapat menyebabkan bahaya serius bagi penyintas dan komunitas, juga membahayakan program iklim dengan merusak keterlibatan komunitas, donatur, dan staf. Organisasi dapat membantu menekan risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dengan mengembangkan kebijakan dan pedoman perilaku yang efektif, mekanisme pengaduan, prosedur investigasi, dan jalur rujukan untuk melaporkan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual secara aman dan rahasia. Koordinasi dengan sektor dan lembaga lainnya juga dapat membantu memastikan penyintas memiliki akses ke dukungan yang diperlukan, seperti layanan kesehatan, dukungan psikososial, dan bantuan hukum. Organisasi yang bekerja sama dengan kontraktor dan pemasok dapat mengurangi risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual melalui proses pengadaan yang kuat, seleksi kontrak yang cermat, penyediaan pelatihan dan peningkatan kesadaran, serta menjaga keterlibatan rutin sepanjang rantai pasokan. Informasi lebih lanjut tentang cara memperkuat upaya pencegahan dan respons eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual tersedia di [Safeguarding Resource Support Hub](#).

Memanfaatkan Pendanaan Iklim untuk mengatasi kekerasan berbasis gender

Pendanaan iklim berpotensi menciptakan tindakan transformatif dengan mengintegrasikan pencegahan kekerasan berbasis gender ke dalam proyek-proyek iklim berbasis sektor yang lebih luas, serta penggunaan sumber daya program secara tertarget untuk aktivitas khusus yang dirancang untuk mengatasi kekerasan berbasis gender. Analisis pendanaan iklim bilateral dari negara anggota OECD DAC menunjukkan peningkatan signifikan dalam integrasi tujuan kesetaraan gender ke dalam program-program utama, dengan jumlah pendanaan jenis ini meningkat empat kali lipat antara 2011-2012 dan 2019-2020.⁵⁰ Namun, jumlah pendanaan yang secara khusus ditujukan untuk kesetaraan gender tetap jauh lebih kecil, dan organisasi hak wanita tidak dapat mengakses pendanaan dalam skala besar.⁵¹ Di tingkat negara, analisis terhadap pendanaan iklim yang diterima Rwanda menunjukkan bahwa hanya 0,01% yang diberi kode tujuan kekerasan berbasis gender, yang menunjukkan kurangnya integrasi sistematis antara kekerasan berbasis gender dan pendanaan iklim.⁵²

Saat ini, masih sedikit contoh proyek pendanaan iklim yang secara langsung menangani kekerasan berbasis gender, tetapi terdapat upaya yang makin meningkat untuk menyertakan pertimbangan gender dan kekerasan berbasis gender ke dalam investasi. Misalnya, WWF menerbitkan Catatan Panduan tentang Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual untuk mengimplementasikan proyek dari Green Climate Fund (GCF) dan Fasilitas Lingkungan Global. Kebijakan gender GCF juga mengharuskan semua proyek melakukan penilaian terhadap tingkat kekerasan terhadap wanita di berbagai negara dan mengidentifikasi langkah intervensi untuk mengatasinya.⁵³ 2X Global menerbitkan dokumen pengarah berjudul 'Penanganan kekerasan dan pelecehan berbasis gender (GBVH) pada titik pertemuan antara pendanaan iklim dan gender' sementara Criterion Institute memiliki panduan uji tuntas untuk risiko kekerasan berbasis gender dalam investasi iklim.⁵⁴



Saran

Saran berikut ini diberikan berdasarkan refleksi dari narasumber dan tren yang diidentifikasi melalui tinjauan pustaka. Saran ini dikelompokkan berdasarkan target audiens dengan detail lebih lanjut di dalam laporan utama.



BAGI PRAKTISI PERUBAHAN IKLIM

1. **Lakukan analisis kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) saat merancang program dan kerangka Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran (MEL) program**, dengan mengacu pada konsultasi dengan organisasi setempat yang merepresentasikan wanita, remaja putri, dan orang-orang dari beragam gender dengan berbagai latar belakang.⁵⁵ Asumsikan kekerasan berbasis gender benar-benar terjadi di dalam komunitas yang terdampak perubahan iklim, kenali jenis-jenis kekerasan berbasis gender yang dapat memengaruhi peserta dan mengganggu capaian program, dan temukan cara-cara yang berpusat pada penyintas dan selaras dengan budaya untuk mengatasinya. Menggunakan analisis tersebut, susun rencana aksi gender dengan anggaran yang mencukupi untuk mengatasi risiko kekerasan berbasis gender sepanjang siklus proyek.
2. **Prioritaskan mitigasi risiko dan prinsip 'tidak merugikan' dalam program iklim** dengan cara mengintegrasikan langkah-langkah pencegahan, mitigasi, dan respons terhadap kekerasan berbasis gender untuk melindungi peserta dan staf, serta untuk mendukung partisipasi penuh dari komunitas, sehingga memastikan aksi iklim yang lebih efektif. Langkah-langkah ini dapat mencakup pelatihan bagi staf dan komunitas, identifikasi atau penyusunan jalur rujukan yang jelas ke layanan dukungan bagi penyintas, pelaksanaan inisiatif pencegahan untuk mendukung transformasi norma sosial, serta upaya kepedulian mandiri dan kolektif seperti penyediaan konseling dan dukungan psikososial bagi penyintas.
3. **Bekerja sama dengan seluruh anggota komunitas untuk membangun kepercayaan dan keterlibatan komunitas guna mengurangi risiko reaksi negatif terhadap partisipasi wanita dalam aksi iklim serta langkah-langkah pencegahan dan respons terhadap kekerasan berbasis gender.** Program harus bekerja sama dengan wanita, remaja putri, pemimpin lokal, pria dan remaja putra, serta pemimpin keagamaan untuk menjelaskan manfaat yang diperoleh dengan mendukung partisipasi perempuan dalam inisiatif iklim dan upaya mengakhiri kekerasan berbasis gender. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan komunitas, mendorong keberlangsungan inisiatif, dan mengurangi perlawanan terhadap peserta dan staf program.
4. **Dapatkan pendanaan yang memadai untuk pencegahan dan respons terhadap kekerasan berbasis gender di dalam desain dan pelaksanaan program.** Seperti program perubahan iklim, program kekerasan berbasis gender yang efektif juga bersifat jangka

panjang, berkelanjutan, dan melibatkan banyak komponen. Penting untuk mencantumkan anggaran yang memadai di dalam proposal program untuk mendanai langkah-langkah pencegahan, mitigasi, dan respons terhadap kekerasan berbasis gender serta mengadvokasi donatur mengenai pentingnya hal ini untuk mencapai tujuan program. Hal ini memerlukan pemanfaatan keahlian, termasuk dari organisasi wanita setempat, untuk merumuskan pendekatan dan mendukung respons apabila kasus benar-benar muncul.



BAGI PENYANDAN

1. **Kembangkan dan investasikan dana ke dalam pendekatan yang menjanjikan yang menghadirkan manfaat bersama untuk mengatasi kekerasan berbasis gender dan perbaikan capaian iklim.** Hal ini harus dibarengi dengan upaya untuk mendokumentasikan, membagikan, dan belajar dari praktik terbaik. Area yang harus dipertimbangkan antara lain adalah mitigasi risiko serta kebutuhan untuk menjalankan prinsip 'tidak merugikan' di semua program iklim, dengan mengidentifikasi dan mengatasi semua bentuk kekerasan berbasis gender. Yang terpenting dalam hal ini adalah menyediakan pendanaan dan panduan kepada mitra pelaksanaan dengan cara:
 - **Memberikan hibah inovasi kecil dan bantuan teknis** untuk menguji dan mengevaluasi pendekatan yang mencegah kekerasan berbasis gender, terutama dalam adaptasi, mitigasi, dan ketahanan iklim. Contohnya adalah hibah Lingkungan yang Berketahanan, Inklusif, dan Berkelanjutan (Resilient, Inclusive and Sustainable Environments/RISE),⁵⁶ yang berfokus pada kekerasan berbasis gender dalam konteks konservasi lingkungan, penggunaan sumber daya di lingkungan yang rentan terhadap pengaruh iklim, dan perlindungan para pejuang hak asasi manusia terkait lingkungan dari kalangan wanita masyarakat adat. Diperlukan lebih banyak uji coba dan evaluasi untuk memahami cara menyesuaikan pendekatan kekerasan berbasis gender yang berhasil dengan kondisi komunitas yang terdampak perubahan iklim.
 - **Kembangkan praktik-praktik baru yang menjanjikan dalam mengintegrasikan kekerasan berbasis gender ke dalam program iklim berskala besar dan sektor relevan lainnya, seperti ketahanan pangan, pertanian tanggap iklim, energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan program kemanusiaan.** Sebagai contoh, program What Works to Prevent Violence against Women and Girls: Impact at Scale⁵⁷ mendukung upaya Lembaga Pengelolaan Air Internasional (International Water Management Institute) untuk menangani perubahan iklim dan memulihkan kerusakan lingkungan dengan cara merancang upaya awal pencegahan kekerasan berbasis gender transformatif guna mendukung komunitas dalam menghadapi bencana iklim dan membangun ketahanan air dan pangan di Yordania, Lebanon, Palestina, dan Mesir.⁵⁸
 - **Menyediakan pendanaan yang fleksibel dan penelitian pendamping.** Hal ini membantu program untuk beradaptasi, dengan mengenali bahwa pendekatan ini

mungkin bersifat inovatif dan didasarkan pada bukti-bukti baru. Misalnya, program What Works to Prevent Violence Against Women and Girls: Impact at Scale mendukung upaya Pusat Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Center for Domestic Violence Prevention/CEDOVIP) di Uganda dalam mengintegrasikan pencegahan dan respons terhadap kekerasan berbasis gender ke dalam upaya mitigasi perubahan iklim yang selaras dengan program pemulihan lahan basah, sambil mengevaluasi program ini secara ketat serta menghasilkan pembelajaran berbasis praktik tentang langkah-langkah yang terbukti efektif.

- **Menyediakan pendanaan yang berkelanjutan dan fleksibel selama beberapa tahun untuk program yang menangani kekerasan berbasis gender dalam konteks perubahan iklim.** Ini dapat mencakup sistem peringatan dini dan tindakan antisipasi. Pendanaan harus mendukung proses pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran adaptif yang efektif. Dukungan keuangan yang berkelanjutan sangat penting untuk menangani perubahan iklim serta kekerasan berbasis gender, karena keduanya adalah masalah yang sudah mengakar dan diperlukan waktu setidaknya beberapa tahun untuk melihat perubahan besar.

2. **Bekerja sama dengan donatur lain untuk mengarahkan pendanaan iklim ke pendekatan yang responsif dan transformatif gender yang dapat mencegah dan merespons kekerasan berbasis gender.** Perjuangkan peningkatan pendanaan iklim yang mendukung kesetaraan gender dan menangani kekerasan berbasis gender. Gunakan dana iklim untuk langsung mendanai proyek penanganan kekerasan berbasis gender jika memungkinkan atau integrasikan pencegahan dan respons terhadap kekerasan berbasis gender ke dalam inisiatif perubahan iklim yang lebih luas.⁵⁹
3. **Dukung aktivis dan praktisi yang bekerja di bidang perubahan iklim dan kekerasan berbasis gender agar mereka dapat menjalankan pekerjaan dengan cara menyediakan pendanaan jangka panjang dan fleksibel bagi organisasi hak-hak wanita, kelompok perubahan iklim wanita, aktivis, serta jaringan lokal pada titik temu antara isu iklim dan kekerasan berbasis gender.** Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan dukungan kemitraan antara organisasi spesialis iklim dan kekerasan berbasis gender, menanggung biaya seperti gaji staf dan dukungan ketahanan bagi staf yang berisiko mengalami kekerasan berbasis gender, memfasilitasi percakapan antara aktivis/praktisi dengan pihak-pihak berwenang yang ingin mereka pengaruhi atau libatkan, mendukung mereka untuk menampilkan karya di panggung global dan konferensi internasional guna memengaruhi pihak lain, serta mendorong perusahaan teknologi untuk menangani kekerasan dan pelecehan online agar tercipta lingkungan yang lebih aman dan suportif untuk pekerjaan mereka.



BAGI PEMERINTAH

1. **Integrasikan kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan berbasis gender ke dalam kebijakan iklim nasional, termasuk Kontribusi Nasional (Nationally Determined Contributions/NDC) dan Rencana Adaptasi Nasional (National Adaptation Plans/NAP).** Lakukan analisis dampak perubahan iklim terhadap kesetaraan gender dan kekerasan berbasis gender ketika mengembangkan kebijakan-kebijakan tersebut. Kembangkan dan dani inisiatif yang berupaya menangani masalah perubahan iklim dan kekerasan berbasis gender, berdasarkan konsultasi dengan beragam organisasi hak-hak wanita (termasuk komunitas adat, LGBTQIA+, dan penyandang disabilitas) dan para ahli. Berikan investasi pada kepemimpinan dan pengambilan keputusan wanita dalam pengembangan NAP dan bagikan pembelajaran kepada pemerintah lokal guna mendukung aksi ini pada semua level secara nasional.
2. **Integrasikan kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan berbasis gender ke dalam program yang mendukung komunitas untuk menangani masalah perubahan iklim.** Dukung komunitas yang terdampak oleh perubahan iklim yang berdimensi gender dengan mendanai program-program spesifik yang berfokus pada penanganan perubahan iklim sekaligus kekerasan berbasis gender, serta mengintegrasikan kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan berbasis gender ke dalam program-program perubahan iklim yang lebih luas.
3. **Perjuangkan kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan berbasis gender dalam ruang kebijakan global terkait perubahan iklim, termasuk UNFCCC.** Sertakan istilah-istilah yang disepakati mengenai kesetaraan gender dalam negosiasi mengenai pembiayaan iklim, adaptasi, kerugian, dan kerusakan, serta 'transisi yang adil'. Soroti kekerasan berbasis gender sebagai bentuk kerugian dan kerusakan non-ekonomi utama. Pastikan Enhanced Lima Work Programme and Gender Action Plan⁶⁰ diterapkan sepenuhnya di tingkat nasional, termasuk melalui penunjukan dan dukungan terhadap Titik Fokus Gender Nasional untuk terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan iklim dan kegiatan pendanaan yang terkait dengan pelaksanaan kerangka kerja ini. Dorong implementasi transformatif gender dari Kerangka Sendai tentang Pengurangan Risiko Bencana dan pantau laporan indikator melalui Kerangka Sendai serta Sendai GAP.
4. **Dukung para pejuang masalah iklim, lingkungan, dan hak asasi manusia, khususnya di lingkungan yang berisiko, melalui pendanaan langkah-langkah perlindungan seperti program pendampingan, serta pemanfaatan pengaruh diplomatik.** Ciptakan lingkungan yang kondusif bagi para pejuang hak asasi manusia untuk menyuarakan dukungan atau penolakan terhadap kegiatan yang merusak lingkungan, termasuk dengan menghapus pembatasan hukum terhadap kegiatan tersebut. Jalin kerja sama dengan perusahaan teknologi untuk menangani kekerasan dan pelecehan online.

**BAGI PRAKTISI PENCEGAHAN KEKERASAN
GENDER**

1. **Uji berbagai pendekatan pencegahan kekerasan berbasis gender yang dapat diintegrasikan ke dalam program iklim berskala besar, dan pantau dampaknya terhadap capaian penanganan kekerasan berbasis gender dan perubahan iklim.** Sebagai contoh, di Uganda, program What Works to Prevent Violence against Women and Girls: Impact at Scale memberikan hibah inovasi untuk mengintegrasikan pencegahan kekerasan berbasis gender ke dalam program pemulihan lahan basah.⁶¹
2. **Jalin kerja sama dengan praktisi iklim untuk menyesuaikan praktik baik yang sudah ada dengan bencana dan perpindahan yang disebabkan oleh perubahan iklim.** Terdapat beberapa contoh praktik baik dalam pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender pada keadaan darurat kemanusiaan, seperti penyediaan jalur rujukan yang jelas bagi penyintas, layanan kekerasan berbasis gender melalui seluler atau online, ruang aman bagi wanita dan remaja putri, serta akses ke dukungan psikososial, yang dapat disesuaikan dengan bencana akibat perubahan iklim sesuai dengan [Standar Minimum Antarlembaga untuk Kekerasan Berbasis Gender dalam Program Kondisi Darurat](#).



BAGI SEMUA YANG T

1. **Libatkan diri dalam upaya lintas sektor untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender dan menangani perubahan iklim.** Lakukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk praktisi perubahan iklim, pembuat kebijakan, masyarakat sipil, peneliti, investor swasta, pemerintah, donatur, dan badan-badan PBB untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang risiko dan faktor pendorong kekerasan berbasis gender, serta pendekatan pencegahan dan respons yang sesuai dengan budaya dan praktik terbaik.
2. **Libatkan wanita, remaja putri, dan orang-orang dari beragam gender dengan berbagai latar belakang⁶² dalam proses perancangan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemantauan inisiatif iklim agar lebih mencerminkan prioritas dan kebutuhan mereka.** Jalin kerja sama dengan organisasi yang mewakili wanita, remaja putri, dan orang-orang dari beragam gender dengan berbagai latar belakang. Ingatlah bahwa wanita, remaja putri, dan orang-orang dari beragam gender bukanlah kelompok yang homogen, tetapi terdiri dari individu-individu dengan berbagai pengalaman dan kebutuhan. Hal ini penting untuk diingat guna memastikan keragaman perspektif dan ide yang menjadi dasar program.
3. **Dokumentasikan pembelajaran berbasis praktik dan kumpulkan bukti tentang langkah-langkah yang efektif untuk mencegah kekerasan berbasis gender dalam inisiatif iklim** guna mendukung pembelajaran dan memperkuat penanganan kekerasan berbasis gender dan aksi iklim. Bukti ini harus mendokumentasikan dampak dari penanganan kekerasan berbasis gender terhadap tujuan-tujuan yang berkaitan dengan aksi iklim, ketahanan, kesetaraan gender, tanggap bencana yang efektif, peringatan dini multi-bahaya, tindakan antisipatif, tanggap bencana, dan transisi menuju ekonomi rendah karbon.
4. **Pastikan semua program, organisasi, dan lembaga memiliki langkah-langkah pengamanan yang kuat untuk mencegah dan merespons eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual.** Langkah-langkah pengamanan harus mencakup pedoman perilaku, mekanisme pelaporan dan pengaduan, serta prosedur investigasi untuk membantu korban melaporkan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dengan cara yang mudah diakses, sejalan dengan budaya, aman, dan rahasia. Organisasi yang bekerja sama dengan kontraktor dan pemasok dapat mengurangi risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual melalui proses pengadaan, seleksi kontrak, pelatihan dan peningkatan kesadaran, serta keterlibatan rutin sepanjang rantai pasokan.

Catatan akhir

- ¹ Laporan ini menggunakan istilah 'orang-orang dari beragam gender' untuk mengacu kepada pengalaman pria transgender, wanita transgender, nonbiner, dan interseks, yang sangat berisiko mengalami kekerasan berbasis gender disebabkan identitas dan ekspresi gender mereka. Seperti halnya istilah 'wanita' dan 'remaja putri', istilah 'orang-orang dari beragam gender' tidak menunjuk pada satu kelompok atau pengalaman yang seragam. Sebaliknya, ini adalah istilah yang (meskipun tidak sempurna) dimaksudkan untuk mengakui pengalaman dan risiko kekerasan berbasis gender yang dihadapi oleh orang-orang yang tidak sejalan dengan ekspektasi tradisional mengenai jenis kelamin dan gender.
- ² Kerr-Wilson, A., Gibbs, A., McAslan Fraser E., Ramsoomar, L., Parke, A., Khuwaja, HMA., dan Jewkes, R. (2020). [A rigorous global evidence review of interventions to prevent violence against women and girls](#), Pretoria: What Works to Prevent Violence Against Women and Girls Global Programme.
- ³ Zhu Y, He C, Bell M, et al. (2023) 'Association of Ambient Temperature with the Prevalence of Intimate Partner Violence Among Partnered Women in Low- and Middle-Income South Asian Countries'. *JAMA Psychiatry*, 80(9):952–961.
- ⁴ Leisher, C., Tamsah, G., Booker, F. et al. (2016) 'Does the gender composition of forest and fishery management groups affect resource governance and conservation outcomes: a systematic map'. *Environmental Evidence*, 5(6).
- ⁵ Cook, N.J., Grillos, T., Andersson, K.P. (2019) ['Gender quotas increase the equality and effectiveness of climate policy interventions'](#), *Nature, Climate Change*, 9: 330-334.
- ⁶ IUCN ['COP28: Pendanaan untuk mengatasi kekerasan berbasis gender di tengah-tengah perubahan iklim mencapai lebih dari 14 juta USD setelah adanya komitmen dari pemerintah Norwegia.'](#)
- ⁷ Bomasang, E. (2022) ['Tackling Gender-Based Violence Exacerbated by Climate Change'](#). Abt global.
- ⁸ Amnesty International (2019) [Challenging power, fighting discrimination: a call to action to recognise and protect women human rights defenders](#). Amnesty International. Halaman 42
- ⁹ Amnesty International (2019) [Challenging power, fighting discrimination: a call to action to recognise and protect women human rights defenders](#). Amnesty International
- ¹⁰ Amnesty International (2019) ['Challenging power, fighting discrimination: A call to action to recognise and protect women human rights defenders'](#).
- ¹¹ Plan International (2023) [Turning the world around: girl and young women activists leading the fight for equality](#). Woking: Plan International.
- ¹² Bolger, M., Marin, D., Tofighi-Niaki, A., Seelmann, L. (2021) [Green mining is a myth: The case for cutting EU resource consumption](#). Brussels: European Environmental Bureau and Greenpeace.
- ¹³ Sebagai contoh, lihat Krishnan, S., et al (2010) ['Do changes in spousal employment status lead to domestic violence? Insights from a prospective study in Bangalore, India'](#), *Social Science and Medicine*, 70(1), 136-43.
- ¹⁴ Kotsdam, A., Ostby, G., dan Aas Rustad, S. (2017) 'Structural change and wife abuse: A disaggregated study of mineral mining and domestic violence in sub-Saharan Africa, 1999-2013, *Political Geography*, 56: 53-65.; Ruppert Bulmer, E., Pela, K., Eberhard-Ruiz, A., dan Montoya, J. (2021) *Global Perspective on Coal Jobs and Managing Labor Transition out of Coal*. World Bank, Washington, DC. Lobao, L., M. Partridge, O. Hean, P. Kelly, S. Chung, dan E. Ruppert Bulmer. (2021) *Socioeconomic Transition in the Appalachia Coal Region: Some Factors of Success*. Produced for the World Bank, under the Global Support to Coal Regions in Transition

- project.; Bennett, K. (2004) 'A time for change? Patriarchy, the former coalfields and family farming', *Sociologia Ruralis*, 44(2): 147-166.
- ¹⁵ National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (2018) '[Sexual Harassment of Women: Climate, Culture and Consequences in Academic Sciences, Engineering and Medicine](#)'. Washington D.C.: The National Academies Press. Committee on Women in Science, Engineering and Medicine.
- ¹⁶ YouGov. (2022) [YouGov/ Global Witness Survey Results](#). London: YouGov.
- ¹⁷ YouGov. (2022) [YouGov/ Global Witness Survey Results](#). London: YouGov.
- ¹⁸ Penelitian ini mengidentifikasi celah dalam bukti yang terdokumentasi seputar risiko khusus yang dihadapi oleh wanita, remaja putri, dan orang-orang dari beragam gender yang mengalami berbagai bentuk marginalisasi. Penelitian untuk mengisi celah ini menjadi sangat penting dilakukan untuk aksi iklim yang inklusif dan memiliki landasan kuat.
- ¹⁹ IFRC (2018) [The Responsibility to Prevent and Response to Sexual and Gender-based Violence in Disasters and Crises](#), p 12, Kuala Lumpur: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.
- ²⁰ Human Rights Watch (2019) [Mozambique: cyclone victims forced to trade sex for food](#). New York: Human Rights Watch.
- ²¹ EBRD, IFC and CDC (2020) *Addressing Gender-Based Violence and Harassment (GBVH) in the Construction Sector*, London: European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), International Finance Corporation (IFC) and CDC Group.
- ²² Berger, E. (2018) [How a community-led response to sexual exploitation in Uganda led to systemic World Bank reform](#). Washington D.C.: Accountability Research Centre.
- ²³ Munala L., Allen, E.M., Frederick, A.J., Ngūnjiri, A. (2023) 'Climate Change, Extreme Weather, and Intimate Partner Violence in East African Agrarian-Based Economies', *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 20(23), 7124.
- ²⁴ Castañeda Camey, I., Sabater, L., Owren, C. and Boyer, A.E. (2020) [Gender-based violence and environment linkages: The violence of inequality](#), Gland: IUCN.
- ²⁵ Vani Bhardwaj (2023) [Gender Responsive Strategies for Climate-Related Disasters in South Asia](#). Gender in Geopolitics Institute
- ²⁶ Save the Children (2023) [Global Girlhood Report 2023: Girls at the Centre of the Storm – Her planet, her future, her solutions](#), London: Save the Children.
- ²⁷ Kvinna till Kvinna (2023) [Hope and resistance go together: the state of women human rights defenders 2023](#). Stockholm: Kvinna till Kvinna.
- ²⁸ Young, H. (2020) [What impact is hate speech having on environmental activists](#). DW
- ²⁹ UNODC (2022) [Global Report on Trafficking in Persons 2022](#), Vienna: UNODC.
- ³⁰ UNEP. (n.d.). [Tentang kerugian dan kerusakan](#).
- ³¹ UNEP. (n.d.). [Tentang kerugian dan kerusakan](#).
- ³² UNEP. (n.d.). [Tentang kerugian dan kerusakan](#).
- ³³ Chakma, T., Rigg, S., and Ramsay, A (2022) [Women confronting loss and damage in Africa](#). London: ActionAid
- ³⁴ Ayeb-Karlsson, S., Chandra, A. & McNamara, K.E. (2023) [Stories of loss and healing: connecting non-economic loss and damage, gender-based violence and wellbeing erosion in the Asia-Pacific region](#). *Climatic Change* 176, 157.
- ³⁵ UNFCCC. (n.d). [Fund for responding to Loss and Damage](#).
- ³⁶ GBV AoR Helpdesk (2021) [Climate Change and Gender-Based Violence: What Are the Links?](#). London: Gender Based Violence in Emergencies.
- ³⁷ IUCN and UN Women (2022) [Addressing Violence Against Women And Girls In The Context Of](#)

- [Climate Crisis And Environmental Degradation, Gland and New York: IUCN and UN Women.](#)
- 38 Development Initiatives and Kvinna till Kvinna Foundation (2024) [From gender-relevant to gender-transformative climate finance: Rwanda case study](#), Bristol and Stockholm: Development Initiatives and Kvinna till Kvinna Foundation
- 39 Wawancara KI
- 40 CARE International (2022) [Men and Women are Two Hands. CARE's experience of Engaging Men and Boys in programming for Climate Justice](#), London: CARE International.
- 41 Termasuk penyandang disabilitas, anggota komunitas LGBTQIA+, kelompok masyarakat adat, orang-orang yang tinggal di pedesaan, para janda, remaja, lansia, orang yang hidup dengan HIV, serta orang-orang yang berasal dari beragam etnis dan latar belakang keagamaan, dan lain-lain.
- 42 Cities Alliance (2022) [Recognizing women's crucial role in climate change adaptation and community resilience](#). Copenhagen: UNOPS. Halaman 4
- 43 Wawancara KI
- 44 IUCN (2023) [Rilis Pers: IUCN mendukung lima proyek baru untuk menangani kekerasan berbasis gender terkait perubahan iklim dan kerusakan lingkungan](#). Gland: IUCN.
- 45 Pasifika Communications (2021) [International Planned Parenthood Foundation \(IPPF\) Simulation Exercise](#). Suva, Fiji: Pasifika Communications.
- 46 Holden, W.N. dan Marshall, S.J. (2018) [Climate Change and Typhoons in the Philippines: Extreme Weather Events in the Anthropocene](#), in Samui, P., Kim, D., dan Ghosh, C. (Eds), *Integrating Disaster Science and Management*, Amsterdam: Elsevier. Halaman 407-421
- 47 Wawancara KI
- 48 Sanchez-Garzoli, G. (2021) ['Insecurity rising in ethnic communities throughout Colombia'](#). Situs web WOLA.
- 49 Hermann, L.J. (2022) ['Threats and banishment: the price to pay for defending water in Colombia'](#). *El Pais*, 29 Agustus 2022.
- 50 OECD (2023) [The gender equality and environment intersection: an overview of development co-operation frameworks and financing](#), Paris: OECD.
- 51 Equality Fund and Mama Cash (2023) [Funding Our Future: Resourcing the Feminist Movements Driving Climate Action](#), Ottawa/Amsterdam: Equality Fund and Mama Cash.
- 52 Development Initiatives and Kvinna till Kvinna Foundation (2024) [From gender-relevant to gender-transformative climate finance: Rwanda case study](#), Bristol and Stockholm: Development Initiatives and Kvinna till Kvinna Foundation
- 53 Glemarec, Y (2022) [Statement by GCF President on International Day for the Elimination of Violence Against Women](#), Global Climate Fund.
- 54 2X Global ['Addressing gender-based violence and harassment \(GBVH\) at the intersection of climate and gender finance'](#) and Criterion Institute (2020) ['Criterion Resources: Tools for Gender Lens Investing'](#)
- 55 Termasuk penyandang disabilitas, anggota komunitas LGBTQIA+, kelompok masyarakat adat, orang-orang yang tinggal di pedesaan, para janda, remaja, lansia, orang yang hidup dengan HIV, serta orang-orang yang berasal dari beragam etnis dan latar belakang keagamaan, dan lain-lain.
- 56 Tantangan untuk calon penerima hibah Resilient, Inclusive and Sustainable Environments (RISE) dikelola oleh IUCN dan didanai oleh United States Agency for International Development (USAID) dan Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad). Lihat <https://genderandenvironment.org/rise-challenge/> untuk informasi selengkapnya.
- 57 What Works to Prevent Violence against Women and Girls: Impact at Scale adalah program tujuh tahun (2021-2028) yang didanai oleh Departemen Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan (FCDO) Inggris untuk meningkatkan upaya

berlandaskan bukti dan praktik lapangan untuk mencegah kekerasan terhadap wanita dan remaja putri (VAWG)

⁵⁸ Lihat '[Pioneering a Holistic approach to Energy and Nature-based Options in MENA for Long-term stability regional climate programme](#)' (PHENOMENAL).'

⁵⁹ Daniel, T. (2021) Guide to strengthening gender integration in climate finance projects, Women's Environment and Development Organization (WEDO) and Climate and Development Knowledge Network (CDKN).

⁶⁰ Enhanced Lima Work Programme disepakati oleh Pihak-Pihak di COP25, dimaksudkan untuk mendorong keseimbangan gender dan integrasi pertimbangan gender ke dalam UNFCCC serta Perjanjian Paris, guna mewujudkan kebijakan dan aksi iklim yang responsif terhadap gender.

Enhanced Gender Action Plan menetapkan tujuan dan kegiatan dalam lima bidang prioritas untuk memasukkan aksi iklim yang responsif terhadap gender ke dalam pekerjaan Para Pihak, Sekretariat UNFCCC, entitas PBB, dan pemangku kepentingan lainnya, serta mendukung partisipasi wanita secara penuh, setara, dan bermakna dalam proses UNFCCC. Lihat [The Enhanced Lima Work Programme on Gender](#). UNFCCC.

⁶¹ CEDOVIP (2024) [Uganda Government Partners with CEDOVIP and @WW2PreventVAWG to Integrate GBV Prevention in Climate Change Initiatives](#)

⁶² Termasuk penyandang disabilitas, anggota komunitas LGBTQIA+, kelompok masyarakat adat, orang-orang yang tinggal di pedesaan, para janda, remaja, lansia, orang yang hidup dengan HIV, serta orang-orang yang berasal dari beragam etnis dan latar belakang keagamaan, dan lain-lain.